



Kamis, 25 Februari 2021

1. Nasabah AJB Datangi OJK
Kontan, hal. 10 / 25-02-2021

Nasabah AJB Datangi OJK

JAKARTA. Kasus gagal bayar nasabah atau pemegang polis Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera tak kunjung tuntas hingga di awal tahun baru 2021. Sementara manajemen Bumiputera mengalami dinamika yang luar biasa. Dari perubahan jajaran direksi dan komisaris yang tidak proper dan status terkini Badan Perwakilan Anggota (BPA) yang menyisakan dua orang, sehingga tidak mencerminkan keterwakilan wilayah nasabah di seluruh Indonesia.

Kelompok nasabah korban gagal bayar Bumiputera kembali melakukan aksi damai sambil menyuarakan suara hati. Aksi kali ini dilakukan di kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Fien Mangiri, Koordinator Kelompok Nasabah Korban Gagal Bayar Bumiputera, menyerukan agar OJK lebih aktif membantu menyelesaikan kasus gagal bayar ini yang tertunda sangat lama. "Tuntutan pertama, OJK segera menyetujui pencairan kelebihan dana cadangan Bumiputera yang ada di OJK supaya manajemen Bumiputera dapat membayar klaim," kata dia, Rabu (24/2).

Selvi Mayasari

2. [Foto] Kerjasama Asuransi Untuk Keluarga
Kontan, hal. 10 / 25-02-2021

Kerjasama Asuransi untuk Keluarga



KONTAN/Carolus Agus Waluyo

Presiden Direktur Panin Dai-ichi Life, Fajar Gunawan (kedua dari kanan) melakukan salam protokol kesehatan dengan Presiden Direktur Marubeni Indonesia, Takeshi Mamiya (kedua kiri) disaksikan Direktur Sales dan Distribusi Panin Dai-ichi Life Yusuke Nakamitsu (kanan) dan Presiden Direktur PT Asia Bestari Citta Masashi Shinohara (kiri) usai penandatanganan kerjasama di Jakarta, Rabu (24/2). PT Panin Dai-ichi Life dengan PT Asa Bestari Citta (perusahaan induk Diary Bunda) bekerjasama meningkatkan kesadaran masyarakat akan kesehatan dan pentingnya memiliki asuransi melalui digital.

3. [FOTO] Perjanjian Kerja Sama
Koran Sindo, hal. 8/ 25-02-2021

Perjanjian Kerja Sama



KORAN SINDO/YORRI FARLI

President Director of Marubeni Indonesia Taksehi Mamiya (kedua kiri), President Director of Panin Dai-ichi Life Fadjar Gunawan (kedua kanan) didampingi President Director of PT Asa Bestari Citta Masashi Shinohara (kiri) dan Director of Sales and Distribution Panin Dai-ichi Life Yusuke Nakamitsu berfoto bersama se usai melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama untuk membantu keluarga Indonesia dalam mempersiapkan proteksi diri di Jakarta, kemarin.

4. [FOTO] Perluas Wawasan Asuransi Melalui Digital
Media Indonesia, hal. 11 / 25-02-2021



DOK PANIN DAI-ICHI

PERLUAS WAWASAN ASURANSI MELALUI DIGITAL: Presiden Direktur PT Panin Dai-ichi Life Fadjar Gunawan (kedua kanan) melakukan salam siku dengan Presiden Direktur PT Marubeni Indonesia Takeshi Mamiya disaksikan Presiden Direktur PT Asa Bestari Citta Masashi Shinohara (kiri) dan Direktur Pemasaran dan Distribusi PT Panin Dai-ichi Life Yusuke Nakamitsu se usai penandatanganan kerja sama antara Panin Dai-ichi Life dan PT Asa Bestari Citta (perusahaan induk Diary Bunda), salah satu anak perusahaan dari Marubeni Indonesia di Jakarta, kemarin.

5. [FOTO] Perluas Wawasan Asuransi Melalui Digital
Investor Daily, hal. 23 / 25-02-2021



Perluas Wawasan Asuransi Melalui Digital

Presiden Direktur PT Panin Dai-ichi Life Fadjar Gunawan (dua dari kanan) melakukan salam siku dengan Presiden Direktur PT Marubeni Indonesia Takeshi Mamiya (dua dari kiri) disaksikan Presiden Direktur PT Asa Bestari Citta Masashi Shinohara (kiri) dan Direktur Pemasaran dan Distribusi PT Panin Dai-ichi Life Yusuke Nakamitsu, usai penandatanganan kerja sama antara Panin Dai-ichi Life dengan PT Asa Bestari Citta (perusahaan induk Diary Bunda), salah satu anak perusahaan dari Marubeni Indonesia di Jakarta, Rabu (24/2/2021). Kerja sama ini bertujuan untuk mengedukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan kesehatan serta pentingnya memiliki asuransi melalui saluran media digital terutama kepada para keluarga yang akan atau memiliki buah hati.

6. Tuntut Pembayaran Klaim, Nasabah Bumiputera Datangi Kantor OJK
[Kompas.com](https://kompas.com) / 24-02-2021

[Home](#) / [Money](#) / [Whats New](#)

Tuntut Pembayaran Klaim, Nasabah Bumiputera Datangi Kantor OJK

Kompas.com - 24/02/2021, 10:50 WIB

BAGIKAN:  

Komentar 



Ilustrasi asuransi Bumiputera (Aldo Fenalosa)

Penulis: **Fika Nurul Ulya** | Editor: **Bambang P. Jatmiko**

JAKARTA, KOMPAS.com - Nasabah korban gagal bayar PT Asuransi Jiwa Bersama (AJB) **Bumiputera** 1912 menggeruduk kantor Otoritas Jasa Keuangan (**OJK**) hari ini, Rabu (24/2/2021).

Aksi damai yang bertempat di Gedung OJK Wisma Mulia 2 ini sudah dimulai sejak pukul 09.00 WIB pagi tadi.

PIC aksi damai, Syakur Usman mengatakan, setidaknya ada 125 orang yang turut mengikuti aksi damai. Dia bilang, pihaknya mengajukan berbagai tuntutan untuk kepentingan nasabah korban gagal bayar.

"Ada 125 orang. Tuntutan ke OJK, proaktif," kata Syakur saat dihubungi Kompas.com, Rabu (24/2/2021).

Syakur menuturkan, OJK harus turun tangan secepatnya mengingat kasus gagal bayar AJB Bumiputera genting diselesaikan.

Para nasabah aksi damai itu meminta OJK turun tangan mendorong AJB Bumiputera untuk segera membayarkan klaim.

Selain itu kata Syakur, nasabah korban Bumiputera juga meminta pembatalan moratorium alias larangan untuk berhenti membayar iuran. Pasalnya aturan yang dikeluarkan itu sangat memberatkan nasabah karena menghambat proses klaim penebusan.

"Dan (kami berharap) OJK cairkan kelebihan dana cadangan Bumiputera supaya klaim pemegang polis bisa dibayarkan," pungkas Syakur.

Sebelumnya diberitakan, AJB Bumiputera memang tengah berupaya keras mencari pendanaan guna membayar klaim nasabah yang kian menggunung.

Tercatat potensi klaim Bumiputera tahun 2020 saja sudah mencapai Rp 9,6 triliun. Untuk membayar klaim kepada nasabah, Bumiputera mengoptimalkan aset yang dimiliki. Optimalisasi aset tersebut melalui penjualan aset properti sekaligus Kerja Sama Operasional (KSO).

Upaya optimalisasi aset merupakan bentuk fungsi serta upaya manajemen bukan hanya untuk memenuhi kewajiban jangka pendek tetapi juga jangka panjang. Jadi bukan opsi semata untuk membayar klaim.

7. Tuntut pencairan hak Rp18 miliar, pemegang polis Bumiputera datangi OJK
[Alinea.id](#) / 24-02-2021

Tuntut pencairan hak Rp18 miliar, pemegang polis Bumiputera datangi OJK

Sedikitnya terdapat 500 polis yang menunggak untuk dibayarkan oleh Bumiputera dengan total nilai sebesar Rp18 miliar.



Nanda Arie Putra

Rabu, 24 Feb 2021 17:36 WIB



Para pemegang polis Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera mendatangi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada Rabu (24/2). Mereka menuntut agar hak yang telah jatuh tempo segera dibayarkan oleh Bumiputera.

Koordinator Kelompok Nasabah Korban Gagal Bayar Bumiputera Fien Mangiri mengatakan, sedikitnya terdapat 500 polis yang menunggak untuk dibayarkan oleh Bumiputera dengan total nilai sebesar Rp18 miliar.

Fien Mangiri mengatakan aksi damai ini kali ketiga yang ditujukan ke OJK agar regulator ini lebih aktif membantu menyelesaikan kasus gagal bayar ini yang tertunda sangat lama.

Ada dua tuntutan dalam aksi damai di OJK, pertama adalah meminta OJK segera menyetujui pencairan kelebihan bayar dana cadangan Bumiputera yang ada di OJK.

"Pertama, OJK segera menyetujui pencairan kelebihan dana cadangan Bumiputera yang ada di OJK supaya manajemen Bumiputera dapat membayar klaim pemegang polis anggota kelompok kami yang data-datanya sudah diserahkan ke OJK," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (24/2).

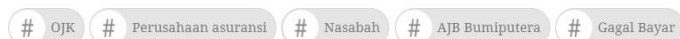
Tuntutan kedua adalah, meminta OJK untuk membatalkan surat keputusan tentang moratorium pada Bumiputera karena hal tersebut telah membuat pemegang polis kesulitan menuntut haknya.

Fien menjelaskan kelompoknya menghimpun para pemegang polis asal Jabodetabek dan Jawa Barat, serta beberapa wilayah di Indonesia.

Kelompok ini sudah mengumpulkan dan menyerahkan data-data pemegang polis yang berstatus habis kontrak (HK), penebusan, meninggal dunia, dan dana kelangsungan belajar (DKB) kepada manajemen Bumiputera dan OJK.

"Kami sudah tiga kali melakukan aksi damai ini, karena janji pencairan tidak kunjung tuntas. Kebutuhan kami di masa pandemi semakin banyak. Padahal kalau klaim itu cair sangat membantu kami untuk mencukupi kebutuhan harian dan yang terpenting biaya pendidikan anak-anak. Karena rata-rata kami membeli polis asuransi pendidikan di Bumiputera," tuturnya.

Tags



8. OJK diminta segera setuju pencairan dana nasabah Asuransi Bumiputera
[Antaranews.com](https://www.antaranews.com/2021/02/24/ojk-diminta-segera-setujui-pencairan-dana-nasabah-asuransi-bumiputera) / 24-02-2021

OJK diminta segera setuju pencairan dana nasabah Asuransi Bumiputera

© Rabu, 24 Februari 2021 18:37 WIB



Bumiputera, ANTARA/bumiputera.com/pri.

“ Kami sudah tiga kali melakukan aksi damai ini, karena janji pencairan tidak kunjung tuntas. Kebutuhan kami di masa pandemi semakin banyak. Padahal kalau klaim itu cair sangat membantu kami untuk mencukupi kebutuhan harian dan yang terpenting biaya pe ”

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diminta untuk segera menyetujui pencairan kelebihan dana cadangan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera kepada nasabah.

Koordinator Kelompok Nasabah Korban Gagal Bayar Bumiputera Fien Mangiri mengatakan pihaknya melakukan aksi damai untuk kali ketiga yang ditujukan ke OJK agar regulator lebih aktif membantu menyelesaikan kasus gagal bayar yang telah tertunda lama. Ada dua tuntutan nasabah dalam aksi damai yang digelar di Kantor OJK tersebut.

“Tuntutan pertama, OJK segera menyetujui pencairan kelebihan dana cadangan Bumiputera yang ada di OJK supaya manajemen Bumiputera dapat membayar klaim pemegang polis anggota kelompok kami yang data-datanya sudah diserahkan ke OJK. Kedua, meminta OJK membatalkan surat keputusan tentang moratorium pada Bumiputera karena mempersulit pemegang polis mengajukan pemutusan klaimnya, ujar Fien melalui keterangan di Jakarta, Rabu.

Fien menjelaskan kelompoknya menghimpun para pemegang polis asal Jabodetabek dan Jawa Barat, serta beberapa wilayah di Indonesia.

Kelompok tersebut sudah mengumpulkan dan menyerahkan data-data pemegang polis yang berstatus habis kontrak (HK), penebusan, meninggal dunia, dan dana kelangsungan belajar (DKB) kepada manajemen Bumiputera dan OJK. Total ada sekitar 500 polis yang dikumpulkan dengan nilai tunai klaim sekitar Rp18 miliar.

“Kami sudah tiga kali melakukan aksi damai ini, karena janji pencairan tidak kunjung tuntas. Kebutuhan kami di masa pandemi semakin banyak. Padahal kalau klaim itu cair sangat membantu kami untuk mencukupi kebutuhan harian dan yang terpenting biaya pendidikan anak-anak. Karena rata-rata kami membeli polis asuransi pendidikan di Bumiputera,” kata Fien.

Kasus gagal bayar nasabah atau pemegang polis AJB Bumiputera tak kunjung tuntas hingga awal 2021. Padahal ribuan bahkan ratusan ribu nasabahnya mengajukan klaim pencairan dananya, karena sudah habis kontrak. Bahkan ada yang sudah mengklaim sejak 2017, tapi hingga hari ini belum dibayarkan.

Di sisi lain, manajemen Bumiputera mengalami dinamika yang luar biasa. Dari perubahan jajaran direksi dan komisaris dan status terkini Badan Perwakilan Anggota (BPA) yang menyisakan dua orang.

Masalah Bumiputera yang semakin tak jelas dan tak kunjung beres ini mendorong Kelompok Nasabah Korban Gagal Bayar Bumiputera kembali melakukan aksi damai sambil menyuarakan suara hati para nasabah.

Pewarta: Citro Atmoko

Editor: Nusarina Yulianti

COPYRIGHT © ANTARA 2021

9. BPA Bumiputera Targetkan Panitia Pemilihan Anggota Baru Kelar Februari 2021 [Bisnis.com](#) / 24-02-2021

BPA Bumiputera Targetkan Panitia Pemilihan Anggota Baru Kelar Februari 2021

Pembentukan panitia itu merupakan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materiil Undang-Undang 40/2014 tentang Perasuransian.



Wibi Pangestu Pratama - Bisnis.com
21 Januari 2021 | 14:09 WIB



Warga memotret logo di kantor cabang asuransi Bumi Putera di Jakarta. *Bisnis - Abdullah Azzam*

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Perwakilan Anggota (BPA) Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 menyatakan akan membentuk panitia pemilihan anggota-anggota baru badan tersebut. Pembentukan itu ditargetkan rampung bulan depan.

Ketua BPA Nurhasanah menjabarkan bahwa pembentukan panitia itu merupakan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materiil Undang-Undang 40/2014 tentang Perasuransian. BPA memenangkan gugatan itu dan landasan hukum Bumiputera pun harus diubah.

Putusan MK itu menetapkan bahwa praktik asuransi mutual seperti Bumiputera harus diatur dengan undang-undang (UU), sehingga akan menggantikan Peraturan Pemerintah (PP) 87/2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama. Implikasinya, berbagai ketentuan dalam PP itu memerlukan payung hukum baru.

Nurhasanah pun menyatakan bahwa langkah pertama pasca terbitnya putusan itu, pihaknya akan membentuk panitia pemilihan anggota baru BPA. Sebelumnya terdapat perintah untuk membentuk panitia pemilihan peserta Rapat Umum Anggota (RUA), yang bentuknya sama dengan BPA, tetapi belum terlaksana sampai saat ini sehingga terjadi kekosongan jabatan.

"Kami akan membentuk panitia Pemilihan BPA dan akan mengusulkan kembali Rencana Penyelesaian Keuangan [RPK] perusahaan. Semoga Otoritas Jasa Keuangan [OJK] dapat menyetujuinya untuk kelangsungan perusahaan," ujar Nurhasanah kepada *Bisnis*, Kamis (21/1/2021).

Dia menargetkan pembentukan panitia itu dapat rampung pada Februari 2021. Selain itu, Nurhasanah pun menargetkan agar sebelas kursi anggota BPA dapat terisi paling lambat Agustus 2021.

"Insya Allah awal Februari sudah terbentuk [panitia pemilihan], targetnya sesuai anggaran dasar maksimal 6 bulan sudah terbentuk [susunan anggota BPA]. Semoga semua bisa berjalan dengan baik dan lancar," ujarnya.

Nurhasanah meyakini bahwa putusan MK itu menjadi gerbang dari terwujudnya eksistensi Bumiputera sebagai asuransi mutual, karena adanya payung hukum berbentuk UU. Dia pun berharap pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat melaksanakan amanat putusan MK dengan baik.

Sebelumnya, Ketua MK Anwar Usman menyatakan bahwa para hakim mengabulkan sejumlah permohonan dari BPA. Dalam sidang Putusan MK pada Kamis (14/1/2021) itu, Anwar mengabulkan permohonan para pemohon yang terdiri dari tiga poin.

Pertama yakni menyatakan bahwa frasa "diatur dalam Peraturan Pemerintah" dalam pasal 6 ayat (3) UU 40/2014 tentang Perasuransian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

MK menyatakan dalam putusan kedua bahwa frasa itu harus diubah menjadi diatur dengan UU, sehingga bunyinya menjadi ketentuan lebih lanjut mengenai badan hukum usaha bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan UU. Oleh karena itu, UU khusus Bumiputera pun harus segera dibuat.

"Memerintahkan Dewan Perwakilan Rakyat [DPR] dan Presiden untuk menyelesaikan UU tentang Asuransi Usaha Bersama dalam waktu paling lama dua tahun sejak putusan ini diucapkan," ujar Anwar dalam persidangan yang dikutip *Bisnis* pada Kamis (14/1/2021).

Terdapat delapan orang pemohon dalam gugatan tersebut yang semuanya merupakan bagian dari BPA Bumiputera, yakni Nurhasanah selaku Ketua BPA, Ibnu Hajar, Maryono, Achmad Jazidie, mendiang Habel Melkias Suwae, Gede Sri Darma, Septina Primawati, dan Khoerul Huda.

Korban Gagal Bayar AJB Bumiputera Demo OJK: Ditagih Sampai Akhirat!!

Rabu, 24 Februari 2021 | 14:29



Reporter:
ARIE



Korban Gagal Bayar AJB Bumiputera Demo OJK: Ditagih Sampai Akhirat!! (suara.com)

“Kedua, meminta OJK membatalkan surat keputusan tentang moratorium pada Bumiputera karena mempersulit pemegang polis mengajukan pemutusan klaimnya,” ujar Fien.

Untuk diketahui perusahaan asuransi AJB Bumiputera 1912 tercatat memiliki utang klaim Rp12 triliun pada akhir 2020. Nilai itu lebih besar dari perkiraan awal senilai Rp9,6 triliun.

Jumlah utang klaim pun terus meningkat ketimbang akhir 2019 yang sebesar Rp5,3 triliun.

11. Ratusan Nasabah Bumiputera Geruduk Kantor OJK Tuntut Pembayaran Klaim

[Keuanganonline.id](https://keuanganonline.id) / 24-02-2021



EKONOMI | JASA KEUANGAN

Ratusan Nasabah Bumiputera Geruduk Kantor OJK Tuntut Pembayaran Klaim

🕒 24/02/2021 👤 Abdul Sabana 💬 No Comments

Jakarta – Ratusan Nasabah PT Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 korban gagal bayar menggeruduk kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hari ini, Rabu (24/2/2021).

Koordinator aksi Syakur Usman mengatakan, setidaknya ada 125 orang yang turut mengikuti aksi damai. Pihaknya mengajukan berbagai tuntutan untuk kepentingan nasabah korban gagal bayar.

“Ada 125 orang. Tuntutan ke OJK, proaktif,” kata Syakur saat dihubungi Kompas.com, Rabu (24/2/2021).

Syakur menuturkan, OJK harus turun tangan secepatnya mengingat kasus gagal bayar AJB Bumiputera genting diselesaikan.

“Para nasabah aksi damai itu meminta OJK turun tangan mendorong AJB Bumiputera untuk segera membayarkan klaim”, ungkapnya.

Syaku menambahkan, nasabah korban Bumiputera juga meminta pembatalan moratorium alias larangan untuk berhenti membayar iuran. Pasalnya aturan yang dikeluarkan itu sangat memberatkan nasabah karena menghambat proses klaim penebusan.

“Dan (kami berharap) OJK cairkan kelebihan dana cadangan Bumiputera supaya klaim pemegang polis bisa dibayarkan,” tambah Syakur.

Di tempat terpisah F. Ghulam Naja, Ketua Tim Advokasi dan Contingency Plan Serikat Pekerja NIBA AJB Bumiputera 1912 menyatakan permasalahan di AJB Bumiputera 1912 bukan hanya persoalan likuiditas yang berdampak pada outstanding klaim yang menggunung yang diderita oleh Pemegang Polis. Namun yang terang penderitaan bagi Pekerja dan Pihak-pihak lain telah terjadi sejak lama dan menjadi penyakit kronis.

“Semua itu terjadi sebagai akibat dari tata kelola yg tidak baik sebagaimana ketentuan yg diterbitkan oleh Regulator”, terangnya.

Jadi aturan atau regulasi dilihat dari prakteknya sudah cocok. Oleh karenanya Pemegang Polis, Pekerja, Agen Asuransi yang menderita kerugian secara nyata tersebut sudah tepat mempertanyakan kepada OJK dalam aksi damai tanggal 24 Februari 2021 tersebut.

“Jangan sampai OJK selaku Pengawas Industri Perasuransian mengetahui kondisi riil dan telah terjadi cukup lama tidak menggunakan peran dan kewenangannya sesuai yang diberikan dalam Undang-undang”, pungkasnya.



Tags: AJB Bumiputera, Nasabah Bumiputera, Nasabah Gagal Bayar, OJK, Tuntut Pembayaran Klaim

12. Nasabah Bumiputera minta OJK setuju pencairan kelebihan dana cadangan Bumiputera [Kontan.co.id](https://kontan.co.id) / 24-02-2021

KEUANGAN / ASURANSI

Nasabah Bumiputera minta OJK setuju pencairan kelebihan dana cadangan Bumiputera

Rabu, 24 Februari 2021 / 16:26 WIB



ILUSTRASI. Tuntut pembayaran klaim, nasabah Bumiputera minta OJK setuju pencairan kelebihan dana cadangan Bumiputera.

Reporter: **Selvi Mayasari** | Editor: **Khomarul Hidayat**

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kasus gagal bayar nasabah atau pemegang polis Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera tak kunjung tuntas hingga di awal tahun 2021. Padahal ribuan bahkan ratusan ribu nasabah Bumiputera mengajukan klaim pencairan dananya, karena sudah habis kontrak. Bahkan ada yang sudah mengklaim sejak 2017, tapi hingga hari ini belum dibayarkan.

Di sisi lain, manajemen Bumiputera mengalami dinamika yang luar biasa. Dari perubahan jajaran direksi dan komisaris yang tidak proper dan status terkini Badan Perwakilan Anggota (BPA) yang menyisakan dua orang, sehingga tidak mencerminkan keterwakilan wilayah nasabah di seluruh Indonesia.

Makin tak jelas dan tak kunjung beresnya masalah Bumiputera ini mendorong Kelompok Nasabah Korban Gagal Bayar Bumiputera kembali melakukan aksi damai sambil menyuarakan suara hati para nasabah. Aksi kali ini dilakukan di kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI sebagai regulator yang bertugas mengawasi industri keuangan.

Fien Mangiri, Koordinator Kelompok Nasabah Korban Gagal Bayar Bumiputera mengatakan, aksi damai kali ketiga ini ditujukan ke OJK agar regulator ini lebih aktif membantu menyelesaikan kasus gagal bayar ini yang tertunda sangat lama.

Ada dua tuntutan dalam aksi damai di OJK, setelah dua aksi serupa digelar di kantor pusat Bumiputera di Jalan MH Thmryn, Jakarta Pusat, pada tahun lalu.

Tuntutan pertama, OJK segera menyetujui pencairan kelebihan dana cadangan Bumiputera yang ada di OJK supaya manajemen Bumiputera dapat membayar klaim pemegang polis anggota kelompok kami yang datanya sudah diserahkan ke OJK.

"Kedua, meminta OJK membatalkan surat keputusan tentang moratorium pada Bumiputera karena mempersulit pemegang polis mengajukan pemutusan klaimnya," ujar Fien dalam keterangan pers, Rabu (24/2).

Fien mengatakan, kelompoknya menghimpun para pemegang polis asal Jabodetabek dan Jawa Barat, serta beberapa wilayah di Indonesia. Kelompok ini sudah mengumpulkan dan menyerahkan data-data pemegang polis yang berstatus habis kontrak, penebusan, meninggal dunia, dan dana kelangsungan belajar kepada manajemen Bumiputera dan OJK. Total ada sekitar 500 polis yang dikumpulkan dengan nilai tunai klaim sekitar Rp 18 miliar.

"Kami sudah tiga kali melakukan aksi damai ini, karena janji pencairan tidak kunjung tuntas. Kebutuhan kami di masa pandemi semakin banyak. Padahal kalau klaim itu cair sangat membantu kami untuk mencukupi kebutuhan harian dan yang terpenting biaya pendidikan anak-anak. Karena rata-rata kami membeli polis asuransi pendidikan di Bumiputera," imbuh Fien.

Siap-siap! Besok Geng Gagal Bayar Bumiputera Geruduk Kantor OJK

Hafid Fuad

Selasa, 23 Februari 2021 - 19:25 WIB



Ilustrasi FOTO/SINDOnews

JAKARTA - Koordinator Nasabah Gagal Bayar (AJB) **Bumiputera** 1912 Rudhi Mukhtar mengumumkan hari Rabu (24/2) akan menggelar aksi demo menuntut gerak cepat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang ber Kantor di gedung Wisma Mulia 2 Jakarta terkait kejelasan gagal bayar Bumiputera.

"Besok kami berjumlah 100 orang akan melakukan aksi demo bersama SPSI AJB Bumiputera. Kami minta OJK harus turun tangan secepatnya karena ini sudah genting," ujar Rudhi saat dihubungi **MNC Portal Indonesia**, Selasa (23/2/2021).

Pihaknya akan mengajukan beberapa tuntutan agar OJK turun tangan mendorong manajemen Bumiputera secepatnya melakukan pembayaran klaim. Intervensi dibutuhkan demi memproses kelebihan dana cadangan yang ada.

"Berikutnya kami juga meminta pembatalan moratorium atau larangan untuk berhenti membayar iuran. Aturan ini memberatkan dan sudah sejak 2016. OJK tolong cabut keputusan moratorium yang selama ini menghambat proses klaim penebusan," tambahnya.

Sementara dari SPSI akan menuntut penyehatan Bumiputera yang bisa dilakukan OJK. Caranya dengan Pembentukan BPA, Komisaris, dan Direksi. Berikutnya juga izin untuk optimalisasi aset-aset Bumiputera demi melunasi pembayaran klaim pemilik polis. "Buktikan OJK masih berfungsi dan aturan POJK No. 69/POJK.05/2016 berlaku. Kami nasabah korban gagal bayar AJB Bumiputera sudah menunggu tahunan," katanya.

Gugatan mereka sudah sewajarnya karena ini berdasarkan kewajiban OJK sesuai pasal 28 - 31 UU 21/2011 dan POJK 1/POJK.07/2013. "Tunjukkan gigimu. Sekarang atau tidak sama sekali," tegasnya.



14. AJB Bumiputera Tak Jelas, Ahmad Sia-sia 17 Tahun Nabung buat Kuliah Anak [Suara.com](https://suara.com) / 24-02-2021

AJB Bumiputera Tak Jelas, Ahmad Sia-sia 17 Tahun Nabung buat Kuliah Anak

Agung Sandy Lesmana | Yaumal Asri Adi Hutasuht

Rabu, 24 Februari 2021 | 17:00 WIB



Ratusan orang nasabah korban gagal bayar AJB Bumiputera menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wisma Mulia 2 Kuningan, Jakarta, Rabu (24/2/2021). (Suara.com/Yaumal Asri)

Suara.com - Ahmad, seorang karyawan swasta harus menelan pil pahit karena uang yang disisihkan untuk tabungan pendidikan kedua anaknya di **AJB Bumiputera** 1912 kini tak jelas rimbanya.

Menurutnya, dana polis pendidikan bagi kedua anaknya senilai Rp130 juta harusnya dibayar pada 2018, namun hingga kini belum ada kepastian dari Bumiputera.

"Saya menyisihkannya selama 17 tahun, masing-masing kedua anak saya polisnya Rp65 juta. Jadi totalnya ada Rp130 juta," jelas Ahmad kepada *Suara.com* di Kuningan Jakarta Selatan, Rabu (24/2/2021).

Merasa seperti dipermainkan, Ahmad pun mengaku sangat kecewa dengan dengan perbuatan perusahaan asuransi itu, sebab dana yang selalu disetorkannya ditujukan demi masa depan kedua anaknya.

"Ini sudah saya rencanakan untuk pendidikan anak, nah sekarang mana tanggungjawab Bumiputera, itu untuk anak-anak kami, pendidikan mereka," kata Ahmad.



Karena hal itu, Ahmad mengatakan saat ini dia harus kewalahan membiayai pendidikan kedua anaknya yang saat ini mengenyam bangku perkuliahan.

"Anak saya tetap sekolah, tapi saya harus mutar otak *nyari* tambahannya. Kalau dana itu cair kondisi saya tidak harus seperti ini," ujarnya.

Tidak adanya kepastian, pada hari ini Kamis (24/2), Ahmad bersama ratusan nasabah korban gagal bayar Bumiputera mendatangi kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK), berunjuk rasa, meminta pertolongan mendesak perusahaan segera membayarkan kewajibannya.

Karena hal itu juga, Ahmad mengaku terpaksa bolos kerja demi mendapatkan kepastian dana polis pendidikan kedua anaknya.

"Saya harus meninggalkan pekerjaan saya, semoga ada kepastian dari OJK untuk kami," ujarnya.

Untuk diketahui, perusahaan asuransi AJB Bumiputera 1912 tercatat memiliki utang klaim Rp12 triliun pada akhir 2020. Nilai itu lebih besar dari perkiraan awal senilai Rp9,6 triliun. Jumlah utang klaim pun terus meningkat ketimbang akhir 2019 yang sebesar Rp5,3 triliun.

Nasabah Bumiputera Kembali Demo Tuntut Pencairan Klaim

Reporter: [Francisca Christy Rosana](#)

Editor: [Martha Warta Silaban](#)

Rabu, 24 Februari 2021 09:52 WIB

KOMENTAR



Nasabah AJB Bumiputera 1912 mendatangi Wisma Bumiputera, Jakarta Pusat, untuk menagih janji pencairan klaim. Kamis, 3 Desember 2020.
Tempo/Caesar Akbar

TEMPO.CO, Jakarta - Pemegang polis PT Asuransi Jiwa Bersama (AJB) [Bumiputera](#) 1912 kembali berdemo menuntut pencairan klaim pada Rabu, 24 Februari 2021. Salah satu koordinator aksi, Syakur Usman, mengatakan aksi digelar pukul 09.30 WIB di Wisma Mulia 2, Jakarta Selatan. "Ada seratus orang yang terlibat (aksi)," ujar Syakur kepada Tempo, Rabu, 23 Februari.

Pantauan Tempo, para [nasabah](#) Bumiputera berkumpul di Masjid Jami Arrohnah, Kuningan, sejak pukul 09.00 WIB. Pemegang polis ini mengenakan kaus berwarna biru bertuliskan "Korban Asuransi Bumiputera". Beberapa di antaranya terlihat membagikan masker dan perlengkapan pelindung lainnya.

Sementara mempersiapkan aksi, sejumlah orang membuka gulungan spanduk kertas bertuliskan tuntutan-tuntutan mereka terhadap perusahaan asuransi. Aksi ini merupakan lanjutan setelah para nasabah menemui bos Bumiputera pada Agustus lalu.

Asuransi Jiwa Bersama atau AJB Bumiputera 1912 tercatat memiliki [utang](#) klaim hingga Rp 12 triliun pada akhir 2020. Angka ini lebih besar dari perkiraan awal senilai Rp 9,6 triliun. Jumlah utang klaim pun terus meningkat ketimbang akhir 2019 yang sebesar Rp 5,3 triliun.

Manajemen menolak sebutan gagal bayar bagi perusahaan dan mengklaimnya sebagai *outstanding claim*. Ketua Badan Perwakilan Anggota (BPA) Bumiputera Nurhasanah menyatakan Bumiputera menghadapi persoalan pokok terkait klaim.

"Kita mungkin sepakat semua, baik rekan dewan komisaris, direksi, kepala unit, dan seluruh wilayah bahwa kita tetap menyebutnya dengan *outstanding claim*, tidak dengan gagal bayar. Ini kesepakatan dulu," ujar Ketua BPA Bumiputera Nurhasanah, 16 Februari lalu seperti dikutip dari Bisnis.

[Bumiputera](#)

[Nasabah](#)

[Demo](#)

[Asuransi](#)

[Utang](#)

16. Demo Tuntut Pencairan Klaim Bumiputera, Nasabah: OJK Jangan Cuek [Tempo.co](https://tempo.co) / 24-02-2021

Demo Tuntut Pencairan Klaim Bumiputera, Nasabah: OJK Jangan Cuek

Reporter: [Francisca Christy Rosana](#)

Editor: [Martha Warta Silaban](#)

Rabu, 24 Februari 2021 11:30 WIB

0 KOMENTAR



Pemegang Polis PT Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 yang tergabung dalam Tim Biru menggelar demo menuntut pencairan klaim di Gedung Wisma Mulia 2, Jakarta, Rabu 24 Februari 2021. Tempo/Francisca Christy Rosana

TEMPO.CO, Jakarta - Sularni, 53 tahun tahun, setengah berteriak menuntut pembayaran klaim asuransi PT Asuransi Jiwa Bersama (AJB) [Bumiputera](#) 1912. Di balik megaphone putih, pemegang polis dana pensiun ini meminta bantuan Otoritas Jasa Keuangan menyelesaikan kasus *outstanding*

"OJK tolong kami. Di tengah pandemi, kami butuh uang. OJK jangan cuek," kata Sularni di depan gedung Wisma Mulia 2, Jakarta Selatan, Rabu, 23 Februari 2021.

Bersama puluhan nasabah lainnya, Sularni ikut dalam aksi demo sejak pukul 10.00 WIB. Ia adalah pemegang polis dana pensiun dengan nilai klaim Rp 70 juta. Ibu rumah tangga asal Bekasi ini mengatakan semestinya klaim asuransinya dicairkan sejak habis kontrak beberapa tahun lalu.

Nasabah lainnya, Juneti, 59 tahun, mengemukakan tuntutan serupa. Pemegang tiga polis dengan nilai hampir seratus juta rupiah itu meminta Bumiputera mencairkan klaim untuk polis pendidikan dan pensiun.

"Polis saya dua pendidikan, nilainya masing-masing Rp 29 juta dan Rp 51 juta. Satu lainnya polis pensiun nilainya Rp 11 juta," kata Juneti.

Juneti mengatakan ia kerepotan membiayai pendidikan dua anaknya akibat klaim asuransi tak cair. Saat ini, satu anak Juneti tengah duduk di bangku SMA dan sebentar lagi akan melanjutkan pendidikan ke tingkat universitas. Sedangkan satu lainnya duduk di bangku kuliah semester VI atau tingkat akhir. "Harusnya selesai pendidikan SMA, klaim keluar," katanya.

Koordinator aksi demo, Fien Mangiri, menjelaskan [nasabah](#) Bumiputera yang tergabung dalam tim biru sudah mengumpulkan dan menyerahkan data pemegang polis yang berstatus habis kontrak (HK), penebusan, meninggal dunia, dan dana kelangsungan belajar (DKB) kepada manajemen Bumiputera dan OJK. Total terdapat 528 polis yang dikumpulkan dengan nilai tunai klaim sekitar Rp 18 miliar.

Menurut Fien, Bumiputera telah mencicil pembayaran klaim pada tahun lalu, namun baru senilai Rp 500 juta. Selain menuntut pencairan klaim, ia mengatakan nasabah mengajukan tuntutan kepada OJK untuk segera mencabut surat moratorium yang menyulitkan nasabah mengajukan putus kontrak.

"Menurut aturan OJK, kalau polis sudah memiliki nilai tunai, nasabah sudah bisa mencairkan," katanya.

Pemegang polis juga meminta OJK menyetujui pencairan kelebihan dana cadangan Bumiputera supaya manajemen dapat membayar klaim pemegang polis. Para nasabah meminta OJK sebagai regulator lebih aktif membantu menyelesaikan kasus gagal yang tertunda sejak 2017.

Bumiputera tercatat memiliki utang klaim hingga Rp 12 triliun pada akhir 2020. Angka ini lebih besar dari perkiraan awal senilai Rp 9,6 triliun. Jumlah utang klaim pun terus meningkat ketimbang akhir 2019 yang sebesar Rp 5,3 triliun.

Bumiputera

OJK

Demo

Nasabah

Asuransi

Nasabah PT AJB Bumiputera 1912 Geruduk Kantor OJK, Minta Proaktif Segera Bayar Klaim Nasabah



Ilustrasi, Nasabah PT AJB Bumiputera 1912 Geruduk Kantor OJK, Minta Proaktif Segera Bayar Klaim Nasabah

TRIBUNJABAR.ID - Nasabah korban gagal bayar PT Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 menggeruduk kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Rabu (24/2/2021) ini.

Aksi damai yang bertempat di Gedung OJK Wisma Mulia 2 ini sudah dimulai sejak pukul 09.00 WIB.

PIC aksi damai, Syakur Usman mengatakan, setidaknya ada 125 orang yang turut mengikuti aksi damai ini.

Syakur mengatakan, pihaknya mengajukan berbagai tuntutan untuk kepentingan nasabah korban gagal bayar.

"Ada 125 orang. Tuntutan ke OJK, agar proaktif," kata Syakur saat dihubungi Kompas.com, Rabu (24/2/2021).

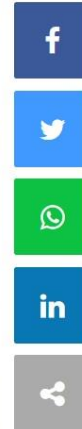
Syakur menuturkan, OJK harus turun tangan secepatnya mengingat kasus gagal bayar AJB Bumiputera genting untuk diselesaikan.

Para nasabah aksi damai itu meminta OJK turun tangan mendorong AJB Bumiputera untuk segera membayarkan klaim.

Selain itu kata Syakur, nasabah korban Bumiputera juga meminta pembatalan moratorium alias larangan untuk berhenti membayar iuran.

Pasalnya aturan yang dikeluarkan itu sangat memberatkan nasabah karena menghambat proses klaim penebusan.

"Dan (kami berharap) OJK cairkan kelebihan dana cadangan Bumiputera supaya klaim pemegang polis bisa dibayarkan," kata Syakur.



🏠 > BERITA > NASIONAL

Saran Ombudsman Mitigasi Potensi Maladminstrasi di Kasus Jiwasraya

Selasa, 23 Februari 2021 | 21:00 WIB

Oleh : Bayu Nugraha



Photo : Ombudsman.go.id

Anggota Ombudsman RI, Alamsyah Saragih, di Jakarta, Minggu, 28 Juni 2020.

SHARE



VIVA – Ombudsman Republik Indonesia menyampaikan saran mitigasi terkait dampak penegakan hukum peristiwa gagal bayar PT Asuransi **Jiwasraya** melalui surat kepada Presiden Republik Indonesia, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua DPR RI.

Ombudsman RI menemukan adanya potensi **maladministrasi** pada saat putusan pengadilan kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya, dimana telah terjadi ketidakakuratan data dalam proses penyitaan rekening efek maupun sub rekening efek dari perusahaan-perusahaan yang terkait dengan kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya.

Anggota Ombudsman RI, Ahmad Alamsyah Saragih mengatakan, Ombudsman telah menerima sejumlah laporan masyarakat mengenai proses blokir, sita dan rampas terhadap rekening efek dan sub rekening efek yang dirasa belum akurat.

"Ombudsman perlu memberikan saran agar proses blokir, sita dan rampas terkait kasus Asuransi PT Jiwasraya agar tidak berujung pada peningkatan jumlah aduan ke Ombudsman di kemudian hari maupun gangguan terhadap stabilitas ekonomi di sektor industri keuangan non-bank," ujarnya, dikutip Selasa, 23 Februari 2021.

Sebelumnya, pada Senin 1 Februari 2021, Ombudsman RI telah melakukan pertemuan audiensi bersama Presiden Republik Indonesia yang salah satunya menyampaikan dampak yang ditimbulkan dalam proses penegakan hukum terkait peristiwa gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya.

19. Pengamat Sebut Rugi BPJS Tenaker Beda dengan Jiwasraya Cnnindonesia.com / 24-02-2021

Pengamat Sebut Rugi BPJS Tenaker Beda dengan Jiwasraya

CNN Indonesia | Rabu, 24/02/2021 06:46 WIB

Bagikan :  



Pengamat menilai penurunan nilai investasi yang dialami BPJS Ketenagakerjaan berbeda dengan Jiwasraya. Ilustrasi. (Adhi Wicaksono).

Jakarta, CNN Indonesia -- **BPJS Ketenagakerjaan** melaporkan terjadi penurunan investasi (*unrealized loss*) sebesar Rp43 triliun pada Agustus-September 2020. Hingga saat ini, Kejaksaan Agung menyatakan penyidik masih mendalami dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana **investasi** tersebut.

Pakar Ekonomi Universitas Kristen Indonesia (UKI) Roy Sembel menyebut sebelum menyamakan kasus BPJS Ketenagakerjaan dengan kasus salah kelola yang berujung pada korupsi seperti kasus Jiwasraya dan Asabri, ada beberapa hal mendasar yang perlu dibedakan.

Salah satunya terkait tujuan investasi. Roy menyebut, dalam setiap pengelolaan dana masyarakat yang jumlahnya besar, dana seharusnya dikelola sesuai dengan tujuannya.

Untuk kasus Jiwasraya, ia menyebut tujuan sudah tidak benar sejak awal yaitu menambal sula kerugian yang dialami perseroan sejak satu dekade. Sejak 2006 sudah ditemukan ekuitas negatif senilai Rp3,29 triliun.

Kerugian kemudian kian kronis. Demi menutupi kerugian kemudian dana ditempatkan di deretan saham-saham berkualitas rendah atau 'gorengan', di samping menjual premi produk JS Saving Plan demi mendapatkan likuiditas baru.

"Gara-gara defisit itu akhirnya dicoba tambal sula dengan produk yang kaget-kagetan, produk *emergency*, produk yang lagi terdesak," katanya pada webinar Infobank bertajuk Pengelolaan Investasi & Potensi Unrealised Loss Pada Lembaga Milik Negara, Selasa (23/2).

Sementara itu, investasi yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan hingga Desember 2020 bersifat *prudent* dan masih mencatatkan untung atau positif 7,38 persen. Tak seperti Jiwasraya, ia menyebut investasi yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan tidak untuk gali lubang tutup lubang demi mempercantik portofolio investasi.

Jika dilihat, dari total dana yang dikelola per Desember 2020 yakni Rp486,38 triliun, hanya 17 persen di antaranya yang ditempatkan di saham.

Tak seperti kasus Jiwasraya, 98 persen saham yang diinvestasikan merupakan saham-saham LQ45 atau saham berfundamental baik.

Menurut dia, penurunan nilai investasi yang dialami BPJS Ketenagakerjaan wajar terjadi di tengah resesi ekonomi yang melanda. Dalam setiap krisis, pasar modal selalu mengalami koreksi karena kepanikan pasar. Dalam rentang setahun, umumnya, pasar modal sudah kembali ke level normal.

Dalam kasus ini, ia menilai potensi kerugian tersebut murni karena mekanisme ekonomi di luar kemampuan manager investasi yang dipilih BPJS Ketenagakerjaan. Kala resesi ia menyebut tak banyak yang bisa dilakukan manager investasi selain menunggu nilai saham kembali ke harga sebelum pandemi.

Secara terpisah, Deputy Direktur Bidang Humas dan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan Irvansyah Utoh Banja menyebut pada 2020 pihaknya telah mengalihkan mayoritas portofolio pada instrumen fixed income sebesar 74 persen dari total portofolio.

Untuk penempatan alokasi aset sebesar 64 persen dari aset ditempatkan pada instrumen surat utang, kemudian deposito sebesar 10 persen, saham 17 persen, reksadana 8 persen, dan investasi langsung 1 persen.

Eko B Supriyanto, Direktur Biro Riset Infobank, mengatakan dalam membedakan kasus rugi Jiwasraya dan BPJS TK, seharusnya membedakan antara *unrealized loss* akibat risiko bisnis dan rugi karena kesengajaan yang berujung pada pidana.

Dalam kasus BPJS TK, ia menyebut potensi kerugian berasal dari risiko bisnis yaitu bergejolaknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Saat indeks baik-baik saja, ia menyebut BPJS Ketenagakerjaan malah mencetak keuntungan. Hingga Desember 2020, hasil investasi yang diperoleh sebesar Rp32,3 triliun.

"Ada beberapa perbedaan mencolok, pertama saham BPJS TK masuk kategori aset elit. Jika ada yang tidak masuk LQ45 minimal pernah mengahuni. Sementara saham Jiwasraya banyak kualitas rendah dan ada dugaan saham gorengan," ujarnya.

Ia menyayangkan banyaknya pihak yang berkoar-koar menyamakan kasus Jiwasraya dan BPJS Ketenagakerjaan sebelum melihat lebih rinci perbedaan keduanya. Pasalnya, dampaknya sangat merugikan kepada pasar modal.

Eko menyebut anggapan *unrealized loss* investasi sebagai kerugian negara sempat membuat BPJS Ketenagakerjaan kapok dan berniat menghindar dari pasar modal. Wacana itu kemudian membuat investor khawatir.